

LAMPIRAN



Lampiran 01 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
 Telp. (0362) 22063 Singaraja
 Alamat e-mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id
 Website : dpmpmsp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/338/REK/DPMPMPTSP/2024
 Lamp : -
 Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari WD. I Fakultas Ekonomi Undiksha Nomor 785/UN48.13.1/DL/2024 Tanggal 2 Mei 2024 Perihal Permohonan Data dan Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Kadek Gita Sari Cahyanti
 NIK : 5103034712010003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Br. Bindu, Desa Mekar Bhuana, Ds. Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal
 Bidang / Judul : Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng
 Jumlah Peserta : 1 orang
 Lokasi : BPKPD Kabupaten Buleleng
 Lamanya : 1 bulan (6 Mei 2024 - 31 Mei 2024)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
 PADA TANGGAL : 07 MEI 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

Lampiran 02 Tampilan SIPD

The screenshot displays the SIPD web application interface. The browser address bar shows the URL `peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/home`. The page header includes the SIPD logo, the year `Tahun Anggaran: 2023`, and the location `Kab. Buleleng` with the motto `Putu Ayu Mira Kusuma Dewi`.

The main content area is titled `Home` and `Total Jurnal`. It features several data cards:

- Anggaran**: 6 Jadwal
- Pendapatan**: 15811 Jurnal
- Belanja**: 59496 Jurnal
- Pembiayaan**: 2 Jurnal
- Transaksi Non Anggaran**: 3247 Jurnal
- Umum**: 2601 Jurnal

Below these cards, there is a section for `Anggaran` with a circular progress indicator showing `Total SKPD 97 Jurnal`. The status is `Belum Approve`, with sub-statuses `Belum Approve Terbaru` and `Approved`. A note indicates `SKPD yang Belum Approve Anggaran` and `Belum Ada Data / Kosong`.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- Dashboard
- Pengaturan
- Input Transaksi Non Anggaran
- Jurnal Umum
- Jurnal To Approve
- Buku Jurnal
- Buku Besar
- Laporan Mutasi Rekening
- Buku Besar Pembantu Bank
- Neraca Saldo
- Kertas Kerja Konsolidasi
- Laporan Keuangan
- Data Integrasi SIKD

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with a search bar, task icons, and system information: `31°C Cerah`, `13:09`, and `08/05/2024`.



Lampiran 03 Tampilan Laporan Keuangan dalam SIPD

Browser tabs: (5) WhatsApp, Yonnas Pancasila Sakti shared, CALK UNAUDITED LKPD TAHUN..., Laporan Neraca - AKLAP

Address bar: peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca

Navigation: Gmail, YouTube, Maps, Disposisi Surat - eS..., g-Kinerja 2.5.1 - Log..., SmartGov Login, Hail Selamat datang..., SIPD, @bkkpbuleleng | L..., MySAPK BKN

SIPD interface: Tahun Anggaran: 2023, Kab. Buleleng, Putu Ayu Mira Kusuma Dewi

Menu: Jurnal To Approve, Buku Jurnal, Buku Besar, Laporan Mutasi Rekening, Buku Besar Pembantu Bank, Neraca Saldo, Kertas Kerja Konsolidasi, Laporan Keuangan (selected), Neraca, LRA, LO, LPE, LAK

TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	Dalam Rupiah	
		2023	2022
1	ASET	3.091.963.752.686	2.957.751.285.581
1.1	ASET LANCAR	226.232.092.528	189.277.779.149
1.1.01	Kas dan Setara Kas	62.113.996.633	55.925.791.785
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	119.721.633.925	110.741.394.933
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	881.123.379	644.580.304
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.975.869.478	28.247.095.178
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	67.737.831.612	31.869.041.403
1.1.09	Piutang Lainnya	59.959.947	60.999.447
1.1.10	Penyisihan Piutang	(76.484.079.588)	(68.633.709.492)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	9.081.990	11.359.084
1.1.12	Persediaan	35.216.675.150	30.411.226.506
	JUMLAH ASET LANCAR	226.232.092.528	189.277.779.149
		0	0
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	250.557.527.919	244.547.488.067
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	378.797.400	375.472.377
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	378.797.400	375.472.377
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	250.178.730.519	244.172.015.690
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	250.178.730.519	244.172.015.690
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	250.557.527.919	244.547.488.067

Windows taskbar: Berita untuk Anda, Respons Dubes..., Search, 0:27, 08/05/2024



Lampiran 04 Dokumentasi Pelatihan yang dilaksanakan



Lampiran 05 Dokumentasi Pelatihan dengan SKPD



Lampiran 06 Formulir *Checklist* Berkas Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

BPMPD KAB BUELENG		CHECKLIST BERKAS REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SKPD		
Nama SKPD / Pemohon	:			
Tgl terima berkas	:			
Berkas Masuk	:	TGL..... / JAM.....s/d	(STAF)	
		TGL..... / JAM.....s/d	(KASUBBID)	
		TGL..... / JAM.....s/d	(KABID)	
Berkas Selesai	:	TGL..... / JAM.....		
CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS DAN VERIFIKASI				
NO	PERSYARATAN	STAF	STATUS PEMERIKSAAN	PARAF
1	LRA		OK / NOT OK	
2	SPJ Fungsional			
3	LO			
4	Neraca			
5	BKU Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran			
6	Rekening Koran Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran			
7	Laporan Penutupan Kas Bulanan			
8	Lampiran Rekonsiliasi Persediaan			
9	BA. Stock Opname Kas Bendahara Pengeluaran			
10	Lampiran Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja			
11	Lampiran Rekonsiliasi BMD			
VERIFIKASI PERSYARATAN		STATUS PEMERIKSAAN		PARAF
- KASUBBID		OK / NOT OK		
- KABID		OK / NOT OK		
Keterangan:				
(√) Berkas Lengkap & Memenuhi Persyaratan				
(X) Berkas Tidak Lengkap (BTL) & Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS)				
No. Dokumen : FM-AKP-01-01 / Revisi : 0 / Tgl Efektif : 18 Januari 2021				

Lampiran 07 Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Telp. (0362) 3301977

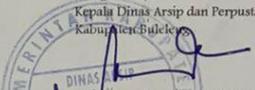
BERITA ACARA
 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN
 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2024
 NOMOR : ...000/073/A/V/2024...

Pada hari ini Rabu Tanggal 15 Bulan Mei tahun 2024 kami selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang Pengguna, Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, telah menuangkan data dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sampai dengan bulan April 2024. Angka angka yang tertuang dalam Laporan tersebut telah kami uji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1.	Laporan Realisasi Anggaran:	
	- Pendapatan
	- Belanja	1.707.275.434,00
2.	Laporan Operasional:	
	- Pendapatan-LO
	- Beban	1.707.275.434,00
3.	Laporan Pengesahan SFJ:	
	- Bendahara Penerimaan
	- Bendahara Pengeluaran	1.707.275.434,00
4.	Sisa Kas di Bendahara:	
	- Penerimaan
	- Pengeluaran	55.103.155,00
5.	Berita Acara Rekonsiliasi Aset:	
	- Aset Tetap	4.499.559.147,75
	- Aset Lain-lain (RB)	1.546.875,00
	- ATP
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga

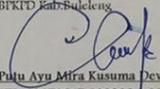
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
 Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
 Kabupaten Buleleng



Made Era Oktarini, S.TP.,MM
 NIP. 19751020 200003 2 005

Yang melakukan rekonsiliasi,
 Kabid Akuntansi dan Pelaporan
 BKPD Kab. Buleleng



Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE., MAP
 NIP. 19870617 200902 2 001

Pejabat Penatausahaan Keuangan
 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 Kabupaten Buleleng,



Ni Made Artini
 NIP. 19691231 19903 2 031

Pengurus Barang Pengguna
 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



Ni Made Artini
 NIP. 19691231 19903 2 031

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
 Kabupaten Buleleng,



Gede Subiksa
 NIP. 19711202199703 1 002

No. Dokumen : FM-AKP-01-02 | Revisi : 0 | Tgl. Efektif : 18 Januari 2021

Lampiran 08 Surat Rekomendasi

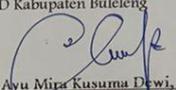

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Telp. (0362) 3301977

SURAT REKOMENDASI
 NOMOR : 900/ 077- A / 1 ✓ / 2024

Telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulan April Tahun 2024 yang terdiri dari :

1 LRA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 SPJ Fungsional	<input checked="" type="checkbox"/>
3 LO	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Neraca	<input checked="" type="checkbox"/>
5 BKU Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Rekening Koran Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Laporan Penutupan Kas Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Lampiran Rekonsiliasi Persediaan	<input checked="" type="checkbox"/>
9 BA. Stock Opname Kas Bendahara Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Lampiran Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja	<input checked="" type="checkbox"/>
11 Lampiran Rekonsiliasi BMD	<input checked="" type="checkbox"/>

Surat Rekomendasi ini menjadikan satu persyaratan untuk pengajuan pencairan dana (SP2D)

Kabid Akuntansi dan Pelaporan
 BFKPD Kabupaten Buleleng

Pulu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE., MAF
 NIP. 19870617 200902 2 001

Singaraja, 15 - 5 - 2024
 Yang menanggapi,

 Cakra

No. Dokumen : FM-AKP-01-03 / Revisi : 0 / Tgl. Efektif : 18 Januari 2021

Lampiran 09 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal :

Waktu pelaksanaan :

B. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

C. Daftar Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimana proses penerapan SIPD di BPKPD Buleleng, khususnya saat pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dilaksanakan?
2. Bagaimana komunikasi yang terjalin antar pelaksana pelayanan dengan SKPD lain?
3. Bagaimana SKPD A dapat melakukan komunikasi dengan pihak BPKPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?
4. Bagaimana sumber daya mulai dari manusia, informasi, serta fasilitas dalam penerapan kebijakan SIPD ini?
5. Apa saja laporan keuangan yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi?
6. Apa hambatan yang sering terjadi dalam proses pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?
7. Apakah solusi yang digunakan untuk menghadapi hambatan yang terjadi tersebut?

Lampiran 10 Transkrip wawancara

Hasil wawancara I

Informan : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, S.E., M.AP.

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal : 24 April 2024

Peneliti	:	“Bagaimana proses penerapan SIPD di BPKPD Buleleng, khususnya saat pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan dilaksanakan?”
Informan	:	<p>“Proses pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD masih dilaksanakan secara manual walaupun semua laporan keuangan merupakan <i>output</i> dari SIPD. SKPD juga diminta untuk melakukan <i>backup</i> data secara manual, bukan hanya di SIPD saja. Ini karena server SIPD berada di pusat yang mana jika suatu saat terjadi eror pada server maka data laporan keuangan masih ada <i>backup</i> data manualnya. Maka dari itu, SIPD dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan sifatnya hanya membantu dalam proses menghasilkan laporan keuangan.</p> <p>Sejauh ini, penerapan SIPD berjalan dengan baik dan lancar, yang mana pada tahun 2022 baru diterapkan di BPKPD Kabupaten Buleleng, kemudian di tahun 2023 sudah berjalan dengan sangat baik dikarenakan sudah adanya penyempurnaan dari fitur-fitur yang masih kurang di tahun 2022.”</p>
Peneliti	:	“Bagaimana komunikasi yang terjalin antar pelaksana pelayanan dengan SKPD lain?”
Informan	:	“Komunikasi antara pegawai dengan SKPD lain dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan berjalan dengan sangat baik. Pihak pelaksana pelayanan juga memberikan beberapa kali pelatihan terhadap SKPD, seperti di tahun 2022 dilaksanakan pelatihan dengan narasumber dari Kemendagri langsung, lalu pelatihan melalui <i>zoom meeting</i> , serta di tahun 2023 memberikan pelatihan

		kepada SKPD dengan narasumber dari pihak pelaksana pelayanan yaitu BPKPD Kabupaten Buleleng.”
Peneliti	:	“Bagaimana SKPD A dapat melakukan komunikasi dengan pihak BPKPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?”
Informan	:	“Media komunikasi yang disediakan cukup banyak yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi oleh pihak SKPD dengan pihak BPKPD, seperti adanya <i>WhatsApp Grup</i> , kemudian disiapkan staff yang bertugas khusus untuk mengampu masing-masing SKPD, yang mana masing-masing staff bisa mengampu 2-3 SKPD yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan SKPD dalam memberikan pelayanan.”
Peneliti	:	“Bagaimana sumber daya mulai dari manusia, informasi, serta fasilitas dalam penerapan kebijakan SIPD ini?”
Informan	:	“Dalam penerapan SIPD, kita saling berbagi informasi melalui pelatihan. Di awal penerapan SIPD, Kasubid Aklap mengikuti pelatihan ke Jakarta dengan mengajak beberapa staff. Kemudian pelatihan kedua di Jakarta diikuti oleh saya sendiri (Kabid) dengan mengajak beberapa staff juga. Setelah itu, baru kita memberikan pelatihan kepada semua staff yang ada di BPKPD untuk pengaplikasian SIPD. Selain itu juga, fasilitas dalam penerapan SIPD cukup baik, mulai dari komputer serta jaringan internet yang sudah tersedia untuk mengakses SIPD.”
Peneliti	:	“Apa saja laporan keuangan yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi?”
Informan	:	“Laporan keuangan ya semuanya. Rekonsiliasi bulanan dilakukan secara bulanan. Setelah semua rekonsiliasi bulan dilakukan, nantinya di akhir tahun khususnya untuk laporan keuangan SKPD Tahun 2022-2023 akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng.”
Peneliti	:	“Apa hambatan yang sering terjadi dalam proses pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?”

Informan	:	“Di awal penerapan SIPD pada tahun 2022 terdapat beberapa hambatan, seperti jurnal <i>double</i> , angka yang sudah dihapus masih muncul di jurnal, fitur-fitur yang masih kurang lengkap seperti fitur LAK yang sudah tersedia namun angka yang dihasilkan tidak cocok. Setelah itu dilaksanakan penyempurnaan pada SIPD, di tahun 2023 sudah tidak ada hambatan yang berarti dan sudah lebih baik dari tahun 2022. Untuk permasalahan di SDM dari SKPD, misalnya seperti salah input, sudah bisa diatasi dengan dipandu oleh pihak pelaksana pelayanan dari BPKPD, apalagi dari pihak BPKPD setiap 6 bulan sekali melaksanakan pendampingan dengan SKPD terkait dengan penerapan SIPD”.
Peneliti	:	“Apakah solusi yang digunakan untuk menghadapi hambatan yang terjadi tersebut?”
Informan	:	“Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, hal yang pertama dilakukan tentunya berkomunikasi dengan pihak Kemendagri dan melakukan konsultasi, kemudian menyediakan <i>backup</i> data secara manual.”

Hasil wawancara II

Informan : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, S.E., M.AP.

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal : 8 Mei 2024

Peneliti	:	“Bagaimana tahapan untuk pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD?”
Informan	:	“Untuk tahapan rekonsiliasi nanti saya kirimkan <i>softcopy</i> , nanti bisa dilihat disana dengan jelas”
Peneliti	:	“Apa saja SOP atau peraturan yang digunakan pada penerapan SIPD dan juga proses rekonsiliasi laporan keuangan ini?”

Informan	:	“Untuk SIPD itu ada Permendagri No. 70 Tahun 2019, lalu untuk rekonsiliasinya bisa dilihat di <i>siftcopy</i> yang saya kirimkan ya”
Peneliti	:	“Bagaimana koordinasi/kerjasama dari masing-masing bidang terkait dengan penerapan SIPD?”
Informan	:	“Koordinasi antar masing-masing bidang berjalan dengan efektif, misalnya seperti adanya pergeseran anggaran, maka akan diinformasikan dan dikoordinasikan, serta kita juga dapat melihat <i>update</i> datanya di SIPD.”
Peneliti	:	“Apakah pernah terjadi salah input dari SKPD?”
Informan	:	“untuk SKPD salah input ada, biasanya proses salah input terjadi di penatausahaan yang biasanya salah memasukan nominal. Jika terjadi salah input, kami dari bidang pelaporan akan saling berkomunikasi, dimana dari bidang kami akan melakukan <i>unapproved</i> terlebih dahulu setelah itu dari pihak SKPD baru bisa mengedit di SIPD kembali”

Hasil wawancara III

Informan : Ketut Mahendra, S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal : 8 Mei 2024

Peneliti	:	“Bagaimana komunikasi yang terjalin antar pelaksana pelayanan dengan SKPD lain?”
Informan	:	“Komunikasinya lancar, kami akan selalu menginformasikan jika ada kesalahan atau kekurangan”.
Peneliti	:	“Bagaimana SKPD A dapat melakukan komunikasi dengan pihak BPKPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?”
Informan	:	“Komunikasi bisa lewat telepon dan grup di <i>WhatsApp</i> ”
Peneliti	:	“Apa hambatan yang sering terjadi dalam proses pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan?”

Informan	:	“Hambatan pasti ada, kadang ada nilai yang belum pas”
Peneliti	:	“Bagaimana kejelasan perintah dalam penerapan SIPD? Konsisten/tidak komunikasi yang terjadi untuk penerapan SIPD seperti tugas-tugasnya?”
Informan	:	“Ya cukup jelas, konsisten dan terstruktur. Awalnya dari atasan, kemudia ke bawah hingga ke pegawainya”.
Peneliti	:	“Apakah terdapat keluhan dalam proses rekonsiliasi yang berkaitan dgn SIPD?”
Informan	:	“Keluhan ada, SIPD sampai saat ini masih dalam proses pengembangan, jadi ada saja masalah, seperti yang seharusnya dihasilkan dari sistem tetapi harus dibuat manual”.
Peneliti	:	“Untuk fasilitas, seperti komputer, printer, wi-fi apakah sudah mendukung atau masih kurang?”
Informan	:	“fasilitas bagus, hanya saja memang jaringan wifiaman tapi terkadang lambat”
Peneliti	:	“Bagaimana tanggung jawab dair masing-masing pegawai terhadap tugasnya?”
Informan	:	“Masing-masing pegawai menangani beberapa SKPD dalam proses rekonsiliasi, tetapi ada beberapa yang masih kurang pemahamannya”

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara

